

KOALISI PARTAI POLITIK UNTUK DEMOKRASI: MEMBANGUN DEMOKRASI KEBANGSAAN DALAM NUANSA PLURALISME

Yusa Djuyandi

Jurusan Marketing Communication, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

In building altogether goodness in democracy and nationality frame, party coalition in presidential and regional head election is not something impossible to be done and even for some people it is needed. Though in Indonesia, political parties could be generated into religion and nationalist parties, religion fundamental in political party in Indonesia has not succeed. The existence of party coalition with different platform or ideology in presidential election on 2004 and 2009, also the execution of regional head election showed that concern towards fundamental existence has no eligible reason. Due to the plurality of Indonesia, cooperation among political parties in building the nations should leave several dichotomies; which will only bring this nation to continuous ideological disintegration and conflict. This also will affect to the nation's ideal and purpose.

Keywords: coalition party, politic, democracy, pluralism

ABSTRAK

Dalam membangun kebaikan bersama dalam kerangka demokrasi dan kebangsaan, koalisi partai dalam pemilihan calon presiden dan kepala daerah bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan dan bahkan beberapa pihak menganggap hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan. Meskipun di Indonesia partai politik dapat digolongkan ke dalam partai agama dan nasionalis, fundamentalisme keagamaan dalam partai politik di Indonesia sampai saat ini belum terjadi. Adanya pemandangan koalisi antar partai yang berbeda platform atau ideologi dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 dan 2009, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap munculnya fundamentalisme sangat tidak beralasan. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang majemuk maka kerjasama partai politik dalam membangun bangsa dan negara harus meninggalkan berbagai dikotomi yang ada. Dikotomi hanya akan membawa Indonesia ke arah perpecahan dan konflik ideologi yang berkepanjangan, dan hal ini akan berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau tujuan nasional.

Kata kunci: koalisi partai, politik, demokrasi, pluralism

PENDAHULUAN

Hampir tidak ada kosa kata politik yang akhir-akhir ini lebih populer dibanding klasifikasi dikotomis agamis-nasionalis, sepasang kata ini tidak ubahnya mantra sakti yang mesti dilafalkan sebagai penyaring bila sebuah partai politik hendak menimang calon presiden beserta wakilnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, atau calon kepala daerah dan wakilnya dalam pemilihan kepala daerah. Coba kita kembali menyimak *headline* beberapa media massa pasca deklarasi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, atau pasangan M. Jusuf Kalla dan Wiranto sewaktu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009, ketiga pasangan ini, selalu menyebut diri sebagai Dwitunggal Nasional yang seolah-olah ingin mewarisi sosok Dwitunggal Soekarno dan Muhammad Hatta.

Dalam alam pikiran mereka, Soekarno merupakan representasi nasionalis dan Bung Hatta adalah titisan dari kubu agamis, poster-poster kampanye Megawati dan Prabowo terpampang kata-kata “Menyatunya Dua Kekuatan Terbesar Bangsa” dengan disertai foto Megawati dan Prabowo dalam edisi *close up*. Di saat yang sama tetapi pada tempat yang berbeda Jusuf Kalla secara eksplisit menyebut pendampingnya, Wiranto, sebagai *the first class nasionalist* dan menyebut duet tersebut sebagai kombinasi menarik antara nasionalis-religius sebab sosok Kalla dikenal sebagai seseorang yang taat dengan nilai-nilai keagamaan sedangkan Wiranto adalah mantan Panglima TNI yang rasa nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakilnya juga tidak pernah terlepas dari dua dikotomi nasionalis-religius, seolah-olah sepasang kata ini memiliki magnet yang begitu kuat dalam menarik massa dukungan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis. Klasifikasi dikotomis agamis-nasionalis terkadang dapat membawa pada suatu kebaikan apabila keduanya dapat bersatu membangun sinergitas demokrasi dan politik, tetapi ada kalanya dikotomis kedua kata ini dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) membawa dampak negatif tatkala keduanya saling berbenturan.

Masyarakat seakan tidak mau tahu apa makna yang sebenarnya tersirat dan tersurat dari dua istilah nasionalis-religius tersebut, realitas politik kita saat ini tampaknya tidak cukup punya tenaga untuk mengubur pandangan lama ikhwal pengkubuan atau faksionalisasi antara kaukus agama dan nasionalis. Padahal sebenarnya labelisasi semacam ini telah ditempatkan pada konteks yang tidak sepenuhnya tepat, dimana masyarakat kemudian akan mudah berasumsi bahwa kalangan agamis tak tentu (bahkan tak mungkin) nasionalis serta demikian pula sebaliknya.

Sebagai simbol dari basis massa atau partai politik, mungkin kosa istilah ini cukup bisa dipahami, tetapi sebagai perlambang dari citra diri dan identitas secara personal, khususnya dalam Pilpres dan Pilkada, jelas hal itu perlu dikoreksi. Karena ternyata tak sedikit kaum nasionalis yang cenderung lebih memiliki kesadaran dan pengamalan agama yang benar ketimbang mereka yang mengklaim diri sebagai agamis, demikian juga sebaliknya. Bahkan dalam diktum-diktum hampir setiap agama dikenal apa yang disebut cinta tanah air atau nasionalisme (dalam khazanah Islam disebut *al-wathaniyyah* atau *hubb al-wathan*) yang dianggap sebagai bagian penting dari iman seorang (agamis).

Pendikotomian agamis-nasionalis dalam kehidupan politik memang pada kenyataannya menimbulkan banyak pro dan kontra, tetapi di dalam iklim atau kehidupan yang demokratis maka kedua kosa istilah tersebut tidak dapat dilenyapkan begitu saja. Hal yang terpenting adalah bagaimana menempatkan kedua kosa istilah tersebut pada konteks yang tepat agar menciptakan suatu hubungan dan kinerja politik yang positif dalam mewujudkan tujuan nasional, penggunaan dua kosa istilah agamis-nasionalis seharusnya tidak membatasi peran partai untuk dapat dan saling bekerjasama dalam pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan kepala daerah dan wakilnya, serta dalam menentukan arah tujuan nasional.

Apabila yang terjadi adalah adanya pembatasan kehidupan berpolitik berdasarkan dua kosa istilah agamis-nasionalis, maka yang terjadi adalah adanya penurunan kualitas kehidupan politik dan demokrasi dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sebagai suatu ilustrasi adalah adanya pendikotomian nasionalis-religius dalam Pilkada DKI Jakarta, telah menimbulkan terjadinya penggalangan koalisi nasionalis, sebagai mayoritas 60 persen, untuk menghadang kubu agamis, minoritas 40 persen.

Dari pemaparan singkat di atas maka dapat diketahui bahwa pentingnya koalisi partai tanpa memandang dikotomis agamis-nasionalis atau religius dalam menciptakan iklim kehidupan politik yang demokratis, di mana beberapa diantaranya dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan presiden, dan kepala daerah secara langsung maupun dalam menetapkan dan mewujudkan tujuan nasional. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu telaah atau karya ilmiah tentang Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi (Membangun Demokrasi Kebangsaan dalam Nuansa Pluralisme).

Hermawan Sulistyono (Cahyono, 1999) mengatakan bahwa dengan tidak adanya partai pemenang mayoritas dalam pemilu mendatang, pada tataran negara memang akan diharuskan adanya koalisi atau aliansi atau bahkan sekadar asosiasi kepentingan antar partai. Ketiga jenis pertautan politik ini derajatnya berbeda. Per definisi, koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau lebih. Aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan di antara dua partai atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Akan halnya asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu relatif lebih singkat.

Landasan Teori

Berbicara mengenai partai politik beserta ideologinya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia maka secara langsung atau tidak langsung juga akan berbicara mengenai kemajemukan atau keragaman politik Indonesia, dalam tatanan kehidupan berdemokrasi perbedaan adalah sesuatu hal yang lumrah kita temui. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan bukan berarti setiap komponen bangsa yang berbeda-beda tidak dapat saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk meraih cita-cita dan tujuan nasional, begitupun seharusnya dengan adanya perbedaan ideologi nasionalis dan religius dalam masing-masing partai politik tidak boleh menghambat adanya kemungkinan untuk saling bekerjasama antar partai yang berbeda ideologi atau paham.

Perbedaan dalam iklim demokrasi adalah suatu hal yang wajar, adanya perbedaan dalam suatu masyarakat menunjukkan bahwasanya masyarakat tersebut telah mencerminkan suatu masyarakat yang demokratis, tetapi menurut pandangan Taylor (dalam O'Sullivan, 2000), suatu masyarakat demokratis perlu mengenal definisi dari *good life*, yaitu: "*In Taylor's view, a democratic society needs some commonly recognized definition of the good life*" (p. 34). Sebagaimana dijelaskan kemudian oleh Taylor bahwa definisi *good life* dari suatu masyarakat yang demokratis tidak terlepas dari tradisi liberal yang mengakui adanya: hak untuk hidup, kebebasan, pemenuhan hak, kebebasan berbicara, kebebasan dalam menjalankan agamanya, dan sebagainya "*...from the very beginning of the liberal tradition: rights to life, liberty, due process, free speech, free practice of religion, and so on*" (pp. 34-35).

Antara definisi *good life* yang harus dipahami oleh suatu masyarakat yang demokratis dengan adanya pluralisme, khususnya dalam ideologi, memiliki suatu keterkaitan, di mana keterkaitan ketiga aspek tersebut yang diatur sedemikian rupa lagi-lagi dapat menciptakan suatu iklim politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Apa yang dikemukakan oleh Taylor tentang pentingnya negara menghargai perbedaan sebagai bentuk melindungi hak-hak dasar warganya, perlu mendapatkan suatu apresiasi, sama halnya dengan perbedaan-perbedaan di bidang lain maka perbedaan dalam bidang politik (*diversity for politics*) perlu untuk dihargai.

Adanya perbedaan ideologi partai politik dalam suatu negara tidak selamanya dapat menghambat proses politik dan upaya pencapaian tujuan nasional, sepanjang masing-masing partai memiliki kesadaran untuk mendahulukan pentingnya urusan bangsa dan negara dibandingkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok dan dirinya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill bahwa rasa kebangsaan akan menciptakan sebuah kepentingan bersama, yang juga memberikan suatu kekuatan dasar yang memadukan warga negara yang pada akhirnya menurut pandangan Mill akan menciptakan suatu kondisi politik yang stabil “*nationality, as ‘a principle of sympathy’, a ‘feeling of common interest’, supplied the strong basis of cohesion amongst a citizenry which he saw as an essential condition of political stability*” (O’ Sullivan, 2000: p. 157).

John Stuart Mill lebih jauh menjelaskan bahwasanya dalam kebangsaan kesuksesan dari perundingan demokrasi membutuhkan diantaranya pertimbangan dan sebuah keinginan untuk mencapai pemufakatan dalam kerjasama sosial “*In On Nationality he has argued, further, that the success of ‘deliberative democracy’ requires trust amongst those deliberating and a willingness to find agreed terms of social co-operation*” (O’ Sullivan, 2000: p. 157).

Pada dasarnya kita tidak bisa melihat definisi dari ideologi hanya dari satu sudut pandang sebab pandangan yang hanya menitikberatkan pada satu sisi atau satu sudut pandang akan mengakibatkan kurangnya informasi yang kita dapatkan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada stigma negatif terhadap salah satu ideologi atau terhadap ideologi. Oleh karena itu penting kiranya kita melihat ideologi dari dua sisi yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Rejai, bahwa kita perlu membedakan ideologi sebagai sebuah konsep dan ideologi sebagai sebuah doktrin politik “*it is necessary to distinguish between ideology as concept and ideology as political doctrine*” (Sargent, 1990: p. 1).

Mustafa Rejai berpendapat bahwa analisis ideologi sebagai sebuah konsep umum merupakan sebuah aktivitas intelektual yang sangat berbeda dengan analisis ideologi sebagai sebuah kepercayaan politik (Sargent, 1990), penggunaan ideologi tertentu oleh partai politik memang cenderung membawa ideologi masuk kedalam definisi kepercayaan politik. Akan tetapi, penggunaan istilah ideologi hanya sebagai suatu kepercayaan politik akan membawa dampak pada tidak adanya kerjasama politik dari masing-masing partai politik yang berbeda aliran.

Setiap partai politik dalam kenyataannya dapat menggunakan ideologi sebagai sebuah aktivitas intelektual, mengingat fungsi partai politik juga sebagai sebuah sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Penggunaan definisi ideologi sebagai sebuah aktivitas intelektual memungkinkan bagi setiap partai yang berbeda paham atau ideologi untuk saling bekerjasama mengisi kekosongan atau kekurangan dari masing-masing paham ideologi, disamping itu masing-masing pihak dapat saling menopang dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan tujuan bangsa dan negara.

Masuknya agama atau religi kedalam salah satu bagian dari ideologi, khususnya ideologi partai politik, dapat ditelaah dari pandangan Louis Althusser dalam bukunya Tentang Ideologi. Pertanyaan Althusser tentang “Apakah Aparatus Negara Ideologis?” pada akhirnya menggiring pada sejumlah realitas tertentu, dimana menurut Althusser bahwa kita dapat memandang institusi agama (ISA agama) sebagai Negara Ideologis (Althusser, 2004).

Akan tetapi, ideologi sebagai suatu aktivitas intelektual dan kepercayaan politik dapat disingkirkan apabila perasaan sebagai suatu bangsa telah muncul dalam diri masing-masing individu, sebab perasaan sebagai suatu bangsa muncul sebagai suatu identitas diri yang melekat tanpa dapat dipisahkan oleh ideologi tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Cobban dalam buku Noel O’ Sullivan yang berjudul *Political Theory in Transition*, bahwa “*Any territorial community, the members of a community, and wish to maintain the identity of their community is a nation*” (O’ Sullivan, 2000: p. 158).

PEMBAHASAN

Koalisi Partai Politik

Koalisi partai dalam pemilihan calon presiden dan kepala daerah bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan dan bahkan beberapa pihak menganggap hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan, mengingat kecilnya peluang seorang calon presiden dan kepala daerah dari sebuah partai mendapat suara mutlak dalam pemilu dan pilkada. Koalisi membantu mengurangi ketidakpastian siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden nanti, koalisi juga biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa dukungan terhadap partai politik sering terkait erat dengan dukungan terhadap calon presiden dan kepala daerah dari partai bersangkutan.

Dalam sistem pemilihan presiden dan kepala daerah di Indonesia, seseorang dicalonkan untuk jabatan tersebut oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan partai politik sampai saat ini setidaknya masih membantu mengurangi tingkat kesulitan memperkirakan perilaku pemilih terhadap calon-calon presiden dan kepala daerah yang akan bersaing dalam pemilihan. Di samping itu, partai politik adalah mesin politik yang punya daya mobilisasi massa paling sistematis, karena itu koalisi antarpartai politik dapat berperan sebagai mesin politik besar untuk memobilisasi massa pemilih yang dicalonkan. Hal tersebut juga mengingat masih belum terdapatnya organisasi sosial-politik lain yang mempunyai kemampuan mobilisasi massa secara nasional sebesar partai politik.

Sebuah koalisi partai dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan *platform* di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. *Platform* yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Tetapi, koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi. Dalam hal kesamaan *platform* di bidang ekonomi, hampir semua partai besar punya *platform* yang sama: dalam retorika menekankan ekonomi kerakyatan, tapi dalam prakteknya masih banyak yang melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi non-kerakyatan. Karena itu, koalisi berdasarkan kesamaan *platform* ekonomi sampai belum menjadi faktor yang paling menentukan kenapa dua partai atau lebih membangun sebuah koalisi, sementara partai lainnya tidak bergabung dengan koalisi tersebut.

Dalam hal *platform* keagamaan, ada partai yang menekankan mendesaknya keterlibatan negara dalam menegakkan syariat Islam bagi kehidupan publik, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan ada pula yang menekankan pada sentimen keagamaan Kristen yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), namun tidak demikian dengan PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD). Untuk sederhananya, kelompok yang pertama adalah partai berbasis keagamaan Islam maupun Kristen, sementara kelompok kedua adalah partai nasionalis sekuler. Dalam dikotomi partai religius Islam dan nasionalis sekuler, PKB dan PAN berada pada posisi yang agak kelabu. Walaupun tidak ber-*platform* Islam, sebagian besar elite dan pendukung partai ini secara historis terkait dengan organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah karena itu secara kasar keduanya kadang-kadang dimasukkan ke kategori partai Islam.

Kalau kesamaan *platform* religius yang jadi dasar untuk koalisi, berarti koalisi yang mungkin adalah antara PPP, PBB, dan PKS, atau bisa juga ditambah PAN dan PKB di satu sisi, disisi lain PDS berkoalisi dengan partai lain yang berbasiskan pada religius Kristen, sedangkan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Golkar. Dalam politik Indonesia pasca-Soeharto, koalisi yang pertama—dikenal dengan nama Poros Tengah—pernah terjadi dan sukses dalam pemilihan presiden di MPR tahun 1999, waktu itu Abdurrahman Wahid sebagai calon dari Poros Tengah menang mengalahkan Megawati. Kalau benar koalisi itu didasarkan atas sentimen keagamaan, mengapa koalisi tidak terjadi

antara Golkar dan PDIP, yang sama-sama sekuler dan terancam oleh kekuatan Islam dan Kristen, dan mengapa dalam pemilihan presiden dan kepala daerah partai-partai Islam berkoalisi dengan partai non-Islam.

Orang yang biasanya melihat politik Indonesia dari kacamata religius keagamaan versus nasionalis-sekuler biasanya melakukan definisi ulang terhadap Golkar ketika dihadapkan dengan masalah tersebut: Golkar pasca-Soeharto adalah Golkar yang didominasi anak-anak santri, terutama yang berlatar belakang Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam banyak hal, Golkar dan PAN tidak banyak berbeda. Karena itu, wakil-wakil Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 cenderung mendukung calon presiden dari Poros Tengah ketika dihadapkan pada pilihan antara Megawati yang nasionalis-sekuler dan Gus Dur yang berlatar belakang santri.

Faktor sentimen keagamaan yang paling menentukan dalam koalisi, memang kembali mencuat ketika pelaksanaan putaran ke satu pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, hal ini sebenarnya telah diprediksi sebelumnya akan kembali terulang, karena sentimen keagamaan elite partai-partai itu pun kurang-lebih sama. Akan tetapi, kemungkinan-kemungkinan lain juga patut dipertimbangkan, sebab dalam putaran kedua Pilpres 2004 beberapa partai keagamaan berkoalisi dengan partai nasionalis, hal serupa juga terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa daerah serta Pemilihan presiden tahun 2009.

Koalisi untuk Demokrasi

Kemunculan partai politik yang berasaskan agama, baik Islam maupun Kristen, merupakan salah satu fenomena politik yang menarik pasca pemerintahan orde baru. Kebangkitan partai-partai seperti ini, khususnya Islam, mendorong munculnya semacam kekhawatiran sebagian kalangan baik di dalam maupun di luar negeri, dimana kemunculan partai-partai yang berbasiskan pada ideologi keagamaan akan memunculkan fundamentalisme keagamaan, khususnya fundamentalisme Islam di Indonesia.

Banyak kalangan juga menilai munculnya kembali ratusan partai politik, baik agamis maupun nasionalis, akan membawa dampak negatif terhadap stabilitas nasional dan politik kebangsaan, dimana antara religius keislaman akan bertarung dengan religius kekristenan, dan diantara partai-partai yang berbasis keagamaan akan bertarung dengan partai nasionalis sekuler. Pandangan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah apabila melihat masing-masing *platform* partai hanya dari satu sudut pandang sempit, seperti halnya melihat fundamentalisme Islam yang terjadi di Timur Tengah dan fundamentalisme Kristen yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Akan tetapi, berbeda dengan halnya di Timur Tengah dan di Eropa, fundamentalisme keagamaan dalam partai politik di Indonesia sampai saat ini belum terjadi, dan seyogyanya beberapa kalangan agama tertentu berharap hal tersebut tidak terjadi. Adanya pemandangan koalisi antar partai yang berbeda *platform* atau ideologi dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 dan 2009, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap munculnya fundamentalisme sangat tidak beralasan.

Ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan, yang berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terciptanya koalisi antar partai yang berbeda ideologi. Diantaranya adalah adanya kepentingan-kepentingan politik murni yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi, atau adanya kesamaan pandangan dan tujuan dalam politik demokrasi kebangsaan demi meraih cita-cita dan tujuan nasional.

Koalisi antar partai yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab elite hanya mementingkan kekuasaan dan

pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi. Sedangkan koalisi yang bertujuan atas dasar adanya kesamaan pandangan dan politik demokrasi kebangsaan demi meraih cita-cita dan tujuan nasional, akan membawa dampak positif bagi terpeliharanya kepentingan rakyat dan terjaminnya segala kebutuhan rakyat.

Bagi sebagian kalangan yang meragukan bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan oleh partai-partai yang berbasiskan pada agama, maka pandangan tersebut dapat dikatakan sepenuhnya salah. Sebagai contohnya, Ahmad Vaezi, seorang Professor Islamic College for Advanced Studies di London, berujar bahwa pemikiran politik Islam kontemporer telah begitu dalam dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi, para pemikir-pemikir muslim yang melakukan perdebatan politik pun tidak dapat mengabaikan signifikansi dari demokrasi. Jadi pentinglah bagi setiap sistem politik alternatif, baik itu religius maupun nasionalis sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Berbeda halnya dengan beberapa pemikir fundamentalis, yang berargumen bahwa antara Islam atau agama dan demokrasi adalah suatu hal yang bertentangan dan tidak dapat direkonsiliasikan.

Beberapa intelektual Muslim lain berpandangan bahwa adanya pandangan yang menyatakan ketidaksesuaian agama dengan demokrasi, disebabkan oleh adanya salah penafsiran terhadap agama, khususnya Islam. Mereka menyatakan bahwa tidak ada konflik antara demokrasi dan sebuah pemahaman agama, yang selalu berubah, rasional, dan selalu sesuai dengan kriteria-kriteria dan nilai-nilai diluar agama, bahwasanya Islam sebagai sebuah agama juga memberikan penekanan terpenting yang mendukung dan menjustifikasi otoritas rakyat dalam suatu pemerintahan yang merujuk pada *syura* (konsultasi).

Apa yang membuat *syura* sebagai suatu unsur mendasar dari demokrasi Islam, agaklah adanya kenyataan bahwa *syura* merujuk pada salah satu esensi-esensi penting dari demokrasi. Demokrasi dalam sejarahnya yang panjang telah mengalami evolusi-evolusi dan perubahan-perubahan, tetapi masalah-masalah seperti partisipasi publik atau masyarakat, peraturan hukum, dan pertanggungjawaban dari penguasa dapat dikatakan esensial bagi demokrasi.

Dari sudut pandang di atas, tidak ada keraguan bahwa ayat suci Al-Quran dan hadist-hadist dari Nabi dan para Imam tentang *syura* menekankan pentingnya partisipasi publik dalam urusan-urusan sosial dan politik, tetapi pertanyaan berkaitan dengan peran politik dari *syura* dalam proses pengambilan keputusan-keputusan tetap ada. Pandangan tentang Islam dan demokrasi di atas kiranya juga searah dengan apa yang dikemukakan oleh Sargent tentang perlunya kita membedakan ideologi agama sebagai sebuah konsep dan sebagai sebuah doktrin politik, ketika kita melihat ideologi sebagai sebuah konsep maka akan lahir kesamaan pandangan dalam beberapa hal, contohnya demokrasi. Seperti telah dijelaskan oleh Ahmad Vaezi bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah suatu hal yang tabu, bahkan banyak sekali nilai-nilai Islam yang mencerminkan demokrasi.

Adanya pandangan-pandangan tentang demokrasi inilah yang kemudian seharusnya dijadikan latar belakang alasan kenapa partai politik yang berbasiskan kepada salah satu agama tertentu, misalnya Islam, memilih untuk mau berkoalisi dengan partai-partai lain yang berbasiskan pada paham nasionalis-sekuler. Perlu juga dipahami kiranya bahwa tidak selalu orang-orang yang berada dalam partai nasionalis sekuler tidak memahami nilai-nilai agama, justeru sebaliknya kita juga harus memahami bahwa mereka mempunyai kepedulian yang cukup besar terhadap agama.

Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan membentuk *baitul ma'dis*, merupakan cerminan kuat bahwa kepedulian terhadap nilai-nilai dan ajaran agama dalam partai nasionalis-sekuler sama kuatnya dengan partai yang berbasiskan pada agama Islam. Bukan suatu hal yang mustahil jika saat ini kita melihat partai yang berbasiskan antar agama dan non-agama saling bekerjasama atau berkoalisi dalam menyokong kandidat kepala daerah, atau bahkan antar partai yang berbeda ideologis agama, contoh PBB, PPP dan PDS saling mendukung.

Penekanannya adalah selama koalisi didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat melalui mekanisme demokrasi, walaupun yang ada dalam koalisi itu adalah partai politik yang berbeda paham atau ideologi maka akan menghasilkan kinerja politik yang luar biasa. Akan tetapi, jika koalisi itu didasarkan pada kepentingan politik murni, walaupun yang berkoalisi itu partai yang memiliki ideologi yang sama maka akan menghasilkan kinerja politik yang buruk.

PENUTUP

Pluralisme paham atau ideologi dalam ranah politik adalah suatu hal yang wajar, tetapi pluralisme itu tentunya tidak boleh sampai menutup peluang bagi terciptanya koalisi untuk demokrasi dalam mencapai tujuan nasional secara bersama-sama. Alangkah baiknya jika ideologi cukup digunakan sebagai simbol dari basis massa atau partai politik yang bisa dipahami oleh setiap orang, atau bahkan digunakan sebagai konsep bukan sebagai suatu doktrin politik yang harus dipaksakan kepada semua orang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap komponen bangsa, tidak terkecuali partai politik, harus meninggalkan berbagai dikotomi yang ada. Dikotomi hanya akan membawa Indonesia ke arah perpecahan dan konflik ideologi yang berkepanjangan, dan hal ini akan berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau tujuan nasional. Koalisi partai politik bukanlah suatu hal yang diharamkan untuk dilakukan, walaupun koalisi itu dilakukan oleh partai-partai yang berbeda ideologi. Yang harus ditekankan dalam koalisi adalah adanya kesamaan *platform* dalam membangun demokrasi sehingga tujuan nasional yang dicita-citakan dapat tercapai, disamping itu koalisi yang berdasarkan kepentingan politik murni harus disingkirkan sebab koalisi ini hanya menguntungkan segelintir orang. Pendapat Cobban tentang persaaan sebagai bagian dari suatu bangsa yang identitasnya dipelihara oleh negara, juga memiliki dampak psikologis politik yang positif bagi upaya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik pribadi dan golongan. Akan tetapi, bukan berarti negara menciptakan kondisi itu untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan paham ideologi yang dianut masing-masing partai.

DAFTAR PUSTAKA

Althusser, L. (2004). *Tentang ideologi*. (O. V. Arnof, Terj.). Yogyakarta: Jalasutra.

Cahyono, R. H. (1999). Menahan laju Golkar dan Habibie. Diakses dari <http://jurnal.wordpress.com/1999/05/25/menahan-laju-golkar-dan-habibie/> [25/05/1999]

O'Sullivan, N. (2000). *Political theory in transition*. London: Routledge.

Sargent, L. T. (1990). *Contemporary political ideologies: A reader*. California: Brooks/Cole.

Vaezi, A. (2006). *Agama politik: Nalar politik islam*. (A. Syahab, Terj.). Jakarta: Citra.

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=609> [21/06/04]

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/05/tgl/27/time/170004/idnews/158811/idkanal/10> [27/05/04]

<http://www.freedom-institute.org/id/index.php?page=profil&detail=artikel&detail=dir&id=150> [4/01/03].